



RENCANA KERJA RENJA 2024



**Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Paser**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna juga bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan mengacu kepada Perencanaan Strategis 2021-2026 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana pembangunan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dibuat untuk periode satu tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dimana dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Dalam melaksanakan Rencana Kerja (RENJA) SKPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal, pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tergambar rencana kerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2024. Rencana Kerja merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam tahun 2024, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak

dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap agar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan media untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Tana Paser, April 2023

Kepala,



Ali Nour Muhamad, SP, M.Si
Bendahara (IV/a)
NIP. 19730903 200604 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	18
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Propinsi	31
3.3. Tujuan dan Sasaran	32
3.4. Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA KAB.PASER	36
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	36
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi	40
BAB V PENUTUP	33

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Table 1	17
Table 2	20
Table 3	24
Table 4	28
Table 5	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mensukseskan Kebijakan Nasional tentang pelaksanaan Otonomi Daerah dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser telah dan terus berupaya semaksimal mungkin memberikan kontribusi yang nyata melalui penyusunan dan pelaksanaan program-program kerja yang dapat dilaksanakan, tepat guna dan tepat sasaran.

Sebagai salah satu acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser untuk melaksanakan program-program kerja efektif dan efisien serta transparan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser yang memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk Visi-Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan,

Program-program serta Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja Bapenda) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah (Bapenda) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberadaan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan tahunan, yang menjadi prioritas kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, serta memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Dalam hal ini, termasuk juga kegiatan yang bersifat mendesak dan penting untuk dilaksanakan serta realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. Penyusunan RENJA SKPD dilakukan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan salah satu mekanisme perencanaan bersifat partisipatif.

Penyusunan Rancangan Renja Bapenda merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Bapenda yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Bapenda mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan

awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rancangan SKPD dapat dikerjakan secara paralel bersamaan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistensi SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang – undangan dan peraturan – peraturan pemerintah yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dispenda, yaitu sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bapenda merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas/badan dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi, dan kebutuhan dinas yang telah dijabarkan lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Paser sehingga perencanaan semakin terintegrasi dan komprehensif serta mampu mendorong komitmen dinas dalam mencapai target realisasi yang telah diprioritaskan. Selain itu, Renja juga bermanfaat sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur tahun 2024 dan menjadi alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan

kinerja tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser secara terukur.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser mempunyai tujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas kegiatan dan menyalurkan aspirasi bidang dan bagian dalam perencanaan SKPD dalam rangka ikut memajukan pembangunan Kabupaten Paser. Serta menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja secara terukur.

Menyadari pentingnya Renja sebagai kesatuan rencana pembangunan daerah, maka diharapkan semua pemangku kepentingan yang terlibat baik pimpinan, staf, maupun mitra kerja secara bersama-sama membangun pemahaman tentang apa, mengapa, dan bagaimana rencana kerja tersebut diterjemahkan dari kebijakan umum daerah ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan, Manfaat, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN 2022

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renja, Kebijakan dan menguraikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 didasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Paser Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2022. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp.15.606.390.305,- (Lima belas milyar enam ratus enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat

diselesaikan dengan realisasi anggaran Rp. 14.224.730.152,- (Empat belas milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 91,15%. Secara detail pelaksanaan untuk program-program Bapenda Tahun 2022 :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 29.575.000,- atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 29.575.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini di antaranya Tersedianya dokumen Renstra 2021 – 2026 dan Dokumen RENJA Tahun 2022.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 215.915.830,- atau 99,97% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 215.970.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tersusunnya dokumen RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 108.516.938,- atau 99,98% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 108.540.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 137.914.533,- atau 99,96% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 137.975.998,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LkjIP).

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 8.886.706.375,- atau 87,49% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp 10.157.930.585,- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN adalah hasil dari capaian sub kegiatan ini.

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 416.482.333,- atau 99,96% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 416.667.184,- Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Tersedianya Laporan keuangan SKPD serta dokumen pelaksanaan akutansi SKPD.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 105.129.278,- atau 95,57% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 110.000.000,- hasil yang akan dicapai tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

b. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 216.865.750 atau 99,30% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 218.393.042,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Tersedianya ATK, sarana kebersihan dan makanan dan minuman rapat.

c. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 164.916.400,- atau 99,97% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 164.962.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini tersedianya barang cetak seperti Amplop, Map, SPPT dan STTS, Fotocopy dan Penjilidan.

d. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*

Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 2.799.996,- sudah terealisasi sebesar Rp. 1.575.000,- atau 56,25% dikarenakan

e. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 227.701.781,- atau 90,89% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 250.515.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di dalam maupun luar daerah.

f. *Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 344.921.827,- atau 98,76% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 349.260.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis yang baik dan benar pada SKPD

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 350.000,- telah terealisasi 100% hasil yang dicapai tersedianya Materai untuk kegiatan kantor.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 96.269.363,- atau 75,97% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 126.719.000,- Untuk keperluan belanja jasa kantor meliputi belanja telepon , belanja air dan belanja listrik.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 38.702.062,- atau 98,71% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 39.208.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini tersedianya mobil dinas yang dipelihara dan surat perizinan kendaraan dinas.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 20.300.000,- atau 100% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 20.300.000,- hasil dicapai yaitu perlengkapan gedung kantor yang terpelihara serta tercapainya pemeliharaan/rehab gedung kantor.

b. Program pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.203.378.979,- atau 93,01% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.218.655.300,- hasil yang akan dicapai tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengembangan pendapatan.

b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 284.961.600,- atau 99,98% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 285.015.000,-. Hasil yang dicapai masih setengah dari target dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada bulan desember.

c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.190.191.610,- atau 99,83% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 190.522.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi pajak daerah meliputi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Paser.

d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 185.129.926,- atau 99,84% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 185.424.500,- Pada sub kegiatan ini didapatkan hasil berupa jumlah objek pajak yang didata dalam bentuk satuan dokumen.

e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.245.754.000,- atau 98,94% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 248.389.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen penerimaan pajak daerah.

f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 359.147.900,- atau 99,32% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 361.623.900,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen jumlah PBB dan BPHTB yang telah diverifikasi.

g. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 271.212.462,- atau 99,76% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 271.855.000,- . Hasil yang dicapai yaitu Tersedianya dokumen wajib pajak yang telah ditetapkan.

h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 407.272.931,- atau 96,73% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 421.029.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen tentang jumlah pelayanan dan konsultasi pajak yang diterima.

i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 221.777.516,- atau 99,98% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 221.829.900,- tersedianya

dokumen berisi jumlah data hasil pemeriksaan pajak daerah adalah capaian yang terdapat pada sub kegiatan ini.

j. Penagihan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 392.069.720,- atau 99,18% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 395.299.400,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan adalah tunggakan pajak daerah yang telah diselesaikan.

k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 228.557.499,- atau 98,81% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 231.317.600,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah diselesaikan 56 kasus keberatan pajak daerah dari 49 kasus yang ditargetkan.

l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 223.433.539,- atau 98,75% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 226.263.900,-

- *Tersedianya Dokumen Laporan Retribusi Daerah.*

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra Bapenda Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Paser

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2024	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahn berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realiasi (%)		Realiasi Capaian dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)			
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	02	KEUANGAN											
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	216%	70%	70%	70%	100%	74%	214%	99%	
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	18	6	6	6	100%	6	18	100%
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	2	2	100%	2	6	100%
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1	1	100%	1	3	100%
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan SKPD	3	1	1	100%	1	3	100%
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	2	2	100%	2	6	100%
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Keuangan	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3	1	1	100%	1	3	100%
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	1	1	100%	1	3	100%
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45	15	15	100%	15	45	100%
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan Gedung Kantor, Alat Tulis Kantor, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30	10	10	100%	10	30	100%

5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	20	20	20	100%	20	60	100%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran dan Peraturan dan Perundang-undangan	1095	365	365	365	100%	365	1095	100%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	90	30	30	30	100%	30	90	100%
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola SKPD	8385	1700	1700	1700	100%	1700	5100	61%
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Berjalan Baik	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda Pos	180	60	60	60	100%	60	180	100%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Belanja Telepon, Air, dan Internet	36	12	12	12	100%	12	36	100%
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan Baik	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	5	5	5	100%	5	15	100%
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	3	1	1	1	100%	1	3	100%
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap APBD	42,5%	13%	7,5%	6,27%	84%	8%	27%	64%
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Peningkatan PAD	75%	9%	9%	-17%	-189%	12%	0	5%
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	3	1	1	1	100%	1	3	100%
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30	10	10	10	100%	10	30	100%

5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang didata	3	1	1	1	100%	1	3	100%
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	3	1	1	1	100%	1	3	100%
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah BPHTB dan PBB yang diverifikasi	261000	86800	86800	86800	100%	87000	260600	100%
							4220	1340	1340	1340	100%	1400	4080	97%
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	4840	1590	1590	1590	100%	1610	4790	99%
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1	1	1	1	100%	1	3	300%
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	300%
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah yang diselesaikan	3.900.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100%	1.300.000.000	3.700.000.000	95%
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	103	41	41	41	100%	35	117	114%
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen Pengawasan Pajak Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	300%

Analisa tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021, yaitu:

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022 merupakan realisasi atas Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 atau tahun terakhir yang didasarkan pada Renstra Perubahan 2021-2026. Pada Tahun 2022 Evaluasi terhadap RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021, terdiri dari 2 (Dua) program, 6 (Enam) kegiatan, dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Yang realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator presentasi peningkatan kualitas pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yaitu terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase tingkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan/APBD yaitu terealisasi sebesar 6,27% dari target yang ditetapkan sebesar 7,5%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rincian tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan dibidang pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh Bupati.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- b. Penetapan kebijakan dibidang Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan yang meliputi Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan Pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2022.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Kab.Paser

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke		Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke		Rasio Capaian pada Tahun ke-		Presentase Peningkatan
					1	2	1	2	1	2	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	16	17	
1	Tingkat penerimaan pajak daerah dalam 1 tahun		Realisasi PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)		Rp 40.098.000.000	Rp 36.717.000.000	Rp 48.074.617.655,26	Rp 37.901.037.493,83	120%	103%	-17%
2	Tingkat penerimaan retribusi daerah dalam 1 tahun				Rp 9.842.337.500	Rp 11.770.389.000	Rp 10.780.217.789,50	Rp 10.843.759.809,00	110%	92%	-17%
3	Tingkat penerimaan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan				Rp 4.938.337.500	Rp 5.723.822.365	Rp 5.038.453.633,21	Rp 5.723.822.365,84	102%	100%	-2%
4	Tingkat Penerimaan lain-lain PAD yang sah				Rp 110.616.838.867	Rp 116.758.063.820	Rp 206.251.856.510,94	Rp 108.330.408.030,93	186%	93%	-94%
5	Meningkatnya Transparansi pelayanan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah				2	2	2	2	100%	100%	0%
6	Persentase Pegawai yang Kompeten di bidang Pendapatan				95	95	78	78	82%	82%	0%
7	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap urgensi pembayaran pajak dan retribusi daerah				84.000	89.000	89.272	89.272	106%	100%	-6%
8	Meningkatnya Jumlah wajib Pajak Yang Membayar Pajak				1	1	1	1	100%	100%	0%
9	Meningkatnya Sistem mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah				24	24	23	23	96%	96%	0%

2.3 Isu isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

- Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- Pembinaan terhadap Wajib Pajak melalui penyuluhan dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk usaha yang khususnya terkait dengan Pajak Daerah.

Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Permasalahan yang muncul pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser adalah masih terdapat piutang pajak daerah yang belum terbayar dan belum optimalnya pendapatan Untuk

menjawab permasalahan tersebut kewenangan yang dapat dikendalikan oleh PD atau faktor internal adalah :

- a. Masih kurangnya kontribusi PAD terhadap APBD
- b. PD rutin melakukan penagihan dan pengawasan kepada wajib pajak
- c. Menyusun strategi pengelolaan pendapatan
- d. Kualitas SDM Aparatur belum terdistribusi secara ideal

Sedangkan kewenangan yang tidak dapat dikendalikan oleh PD atau faktor eksternal adalah :

- a. Banyaknya potensi pajak daerah di Kab Paser
- b. Dampak Covid-19 terhadap realisasi pendapatan daerah.
- c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah
- d. Sinergitas OPD Penghasil PAD tidak Optimal

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.3.1 Tantangan

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pajak;
- c. Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga;
- d. Sering berubahnya Peraturan Pusat/Daerah menyulitkan aparat dalam melaksanakan tugas;
- e. Kurang koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pajak.

2.3.2 Peluang

- a. Sebagai Kabupaten Paser yang dekat dengan ibukota potensi bertambahnya Wajib Pajak (WP) cukup terbuka;
- b. Berkembangnya investasi dan kunjungan wisata kab paser memungkinkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kab. paser

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada, maka faktor-faktor penentu keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan profesionalisme SDM aparat lembaga untuk meningkatkan pelayanan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Adanya optimalisasi sistem informasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Adanya pemberdayaan SDM dan optimalisasi koordinasi internal untuk memupuk kepercayaan masyarakat dan dunia usaha;
4. Adanya optimalisasi penggunaan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pemungutan pajak dari WP yang sudah ada;
5. Adanya kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi pemungutan Pajak terhadap WP baru.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Rancangan awal RKPD Badan Pendapatan Daerah dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Paser

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	indeks kepuasan pelayanan masyarakat	72%	13.557.025.536,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	indeks kepuasan pelayanan masyarakat	72%	13.557.025.536,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	669.063.484,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	669.063.484,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	tersedianya dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Dokumen	75.999.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	tersedianya dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Dokumen	75.999.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	384.676.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	384.676.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	tersusun nya dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dokumen	89.429.984,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	tersusun nya dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dokumen	89.429.984,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	tersusunnya dokumen evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	118.958.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	tersusunnya dokumen evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	118.958.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan	100%	10.912.692.585,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan	100%	10.912.692.585,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	1 Tahun	10.457.930.585,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	1 Tahun	10.457.930.585,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	Dokumen Pelaksanaan Akuntansi	1 Tahun	454.762.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	Dokumen Pelaksanaan Akuntansi	1 Tahun	454.762.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase Peningkatan Administrasi Umum	100%	1.813.434.487,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase Peningkatan Administrasi Umum	100%	1.813.434.487,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Unit	338.254.240,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Unit	338.254.240,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	tersedianya ATK,sarana kebersihan dan makanan dan minuman Rapat	10 Jenis	223.939.200,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	tersedianya ATK,sarana kebersihan dan makanan dan minuman Rapat	10 Jenis	223.939.200,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	tersedianya barang cetak dan penggandaan	20 Jenis	322.601.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	tersedianya barang cetak dan penggandaan	20 Jenis	322.601.000,00	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	tersedianya koran dan peraturan perundang-undangan	365 Exempler	3.817.500,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	tersedianya koran dan peraturan perundang-undangan	365 Exempler	3.817.500,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah	30 Kali	350.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah	30 Kali	350.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola SKPD	1700 Berkas	574.822.547,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola SKPD	1700 Berkas	574.822.547,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Pengadministrasian Umum Berjalan Dengan Baik	100%	120.349.980,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Pengadministrasian Umum Berjalan Dengan Baik	100%	120.349.980,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	tersedianya benda pos dan materai	60 Lembar	349.980,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	tersedianya benda pos dan materai	60 Lembar	349.980,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	tersedianya belanja telepon,air ,Listrik, dan Internet	12 Bulan	120.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	tersedianya belanja telepon,air ,Listrik, dan Internet	12 Bulan	120.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Pemeliharaan Barang milik daerah Berjalan Dengan Baik	100%	41.485.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Pemeliharaan Barang milik daerah Berjalan Dengan Baik	100%	41.485.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Tersedianya jumlah mobil jabatan/operasional yang dipelihara dan surat perizinan kendaraan dinas/operasional	5 Unit	18.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Tersedianya jumlah mobil jabatan/operasional yang dipelihara dan surat perizinan kendaraan dinas/operasional	5 Unit	18.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Tahun	22.985.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Tahun	22.985.000,00	
5.02.004	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Paser	Rasio PAD terhadap APBD	7,7%	4.102.606.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Paser	Rasio PAD terhadap APBD	7,7%	4.102.606.900,00	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab. Paser	Persentase Peningkatan PAD	10%	4.102.606.900,00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab. Paser	Persentase Peningkatan PAD	10%	4.102.606.900,00	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Paser	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	1 Dokumen	248.489.000,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Paser	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	1 Dokumen	248.489.000,00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Paser	Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen	268.150.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Paser	Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen	268.150.000,00	

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	10 Kecamatan	374.356.900,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	10 Kecamatan	374.356.900,00	
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Paser	jumlah objek pajak yang didata	1 Dokumen	262.549.200,00	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Paser	jumlah objek pajak yang didata	1 Dokumen	262.549.200,00	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Paser	dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	354.242.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Paser	dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	354.242.000,00	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Paser	Jumlah PBB dan BPHTB yang telah diverifikasi	87000 WP PB 1400 WP BPHTB	681.890.800,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Paser	Jumlah PBB dan BPHTB yang telah diverifikasi	87000 WP PB 1400 WP BPHTB	681.890.800,00	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	1610 WP	267.520.200,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	1610 WP	267.520.200,00	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1 Dokumen	244.300.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1 Dokumen	244.300.000,00	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1 Dokumen	355.092.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1 Dokumen	355.092.000,00	
Penagihan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah tunggakan Pajak Daerah yang di selesaikan	Rp1.300.000.000	593.339.600,00	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah tunggakan Pajak Daerah yang di selesaikan	Rp 1.300.000.000	593.339.600,00	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang di selesaikan	35 Kasus	202.677.200,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang di Selesaikan	35 Kasus	202.677.200,00	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Paser	Dokumen Laporan Retribusi Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Paser	Dokumen Laporan Retribusi Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	
TOTAL				Rp 17.659.632.436,00	TOTAL				Rp 17.659.632.436,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapenda dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Bapenda. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

Table T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Paser

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Visi, Misi Strategis dan Permasalahan Pembangunan lima tahun kedepan maka arah kebijakan pada RPJMD tahun 2016 - 2021 Kabupaten Paser merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi yang telah dipilih dan merupakan akselerasi sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser serta kebijakan pada masing-masing sasaran misi pembangunan Kabupaten Paser. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser yang memiliki sasaran meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi sumber-sumber pendapatan. Berjalannya roda pemerintahan sangat tergantung dari adanya sumber dana yang memadai. Sumber dana penyelenggaraan pemerintah ini adalah Pendapatan Asli Daerah, yang banyak disumbangkan dari Pajak Daerah. Kondisi ekonomi yang masih belum baik dan adanya isu negatif yang bersifat sosial dan ekonomi juga mempengaruhi pluktuasinya penerimaan pendapatan asli daerah.

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Propinsi

Sebagaimana RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 arah tematik tahunan pembangunan, pada Tahun 2023 adalah "Penguatan pasar produk-produk unggulan untuk menampung hasil produksi Kalimantan Tim



Sesuai tema pembangunan rancangan RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah : "Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat" dan memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2023, Renja Bapenda Kabupaten Paser Tahun 2023 tidak mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda yaitu Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah, maka dukungan Bapenda dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi kegiatan operasional dibidang Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan pendapatan daerah guna mendukung rencana pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi,

rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan cara mendorong partisipasi masyarakat/swasta.

3.3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Faktor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pendapatan Daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Badan Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Paser 2016 – 2021.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diterjemahkan dalam bentuk misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan dan Kualitas Kinerja SDM;

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak;
4. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yaitu:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor PAD

2. Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang responsive dan tangkas

Untuk dapat mewujudkan tersebut maka dilaksanakan dengan;

1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan sasarannya adalah:

Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun.

2. Optimalisasi Pelayanan Prima dengan sasarannya adalah:

- Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Paser.
- Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan penunjang yang memadai.
- Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah.

3. Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Aparatur dan Organisasi

dengan sasarannya dan Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan/organisasi dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di bidang pendapatan daerah.
 - Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Badan Pendapatan Daerah.
 - Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pajak pada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, termasuk di dalamnya kesadaran akan porporasi.
 - Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Paser, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan dengan sasarannya adalah: Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.
5. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah

3.4. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program / kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut Rancangan RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan propinsi. Dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah kabupaten paser merencanakan program dan kegiatan terdiri dari 2 program wajib dan 6 kegiatan di tahun 2023 serta perkiraan maju 2024 adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 kegiatan dengan total pagu indikatif untuk tahun 2023 sebesar Rp.12.144.687.544,-

2. Program Pengelolaan Pajak Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan total pagu indikatif yang dibutuhkan sebesar Rp.2.847.985.500,-

Dari 2 program dengan 6 kegiatan tersebut badan pendapatan daerah mengusulkan total rencana kebutuhan pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 14.992.673.044 dan dijabarkan dalam tabel berikut

Tabel T-C.33
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Paser
Rancangan Renja 2023 dan Prakiraan Maju 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				catatan Penting	perkiraan maju tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan dana pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan dana/Pagu indikatif
5	KEUANGAN								
5 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan pelayanan sekretariat	Badan Pendapatan Daerah		Rp 14.992.724.968			Rp 17.659.632.436	
5 02 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Badan Pendapatan Daerah	6 Dokumen	Rp 396.521.049		6 Dokumen	Rp 669.063.484	
5 02 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Badan Pendapatan Daerah	2 Dokumen	Rp 23.999.500	APBD	2 Dokumen	Rp 75.999.500	
5 02 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Rp 194.438.000	APBD	1 Dokumen	Rp 384.676.000	
5 02 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Rp 89.125.000	APBD	1 Dokumen	Rp 89.429.984	
5 02 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Badan Pendapatan Daerah	2 Dokumen	Rp 88.958.549	APBD	2 Dokumen	Rp 118.958.000	
5 02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	100%	Rp 10.771.946.569		100%	Rp 10.912.692.585	
5 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Badan Pendapatan Daerah	1 Tahun	Rp 10.457.980.585	APBD	1 Tahun	Rp 10.457.930.585	
5 02 01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Rp 313.965.984	APBD	1 Dokumen	Rp 454.762.000	
5 02 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	100%	Rp 817.446.550		100%	Rp 1.813.434.487	
5 02 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Badan Pendapatan Daerah	15 jenis	Rp 66.152.750	APBD	15 jenis	Rp 338.254.240	
5 02 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Badan Pendapatan Daerah	10 Jenis	Rp 193.732.300	APBD	10 Jenis	Rp 223.939.200	
5 02 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Badan Pendapatan Daerah	20 Jenis	Rp 151.961.000	APBD	20 Jenis	Rp 322.601.000	
5 02 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Badan Pendapatan Daerah	365 Exemplar	Rp 3.817.500	APBD	365 Exemplar	Rp 3.817.500	
5 02 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Badan Pendapatan Daerah	30 kali Rapat Koordinasi	Rp 154.983.000	APBD	30 kali Rapat Koordinasi	Rp 350.000.000	
5 02 01	Arsip Dinamis		Badan Pendapatan Daerah	1604 Berkas	Rp 246.800.000	APBD	1604 Berkas	Rp 574.822.547	

5	02	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	Badan Pendapatan Daerah	100%	Rp 125.340.000	APBD		100%	Rp 120.349.980
5	02	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Badan Pendapatan Daerah	60 Lembar	Rp 350.000	APBD		60 Lembar	Rp 349.980
5	02	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	Rp 124.990.000	APBD		12 Bulan	Rp 120.000.000
5	02	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan Baik	Badan Pendapatan Daerah	100%	Rp 33.485.000	APBD		100%	Rp 41.485.000
5	02	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Badan Pendapatan Daerah	5 Unit	Rp 11.500.000	APBD		1 Paket	Rp 18.500.000
5	02	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Badan Pendapatan Daerah	1 Tahun	Rp 21.985.000	APBD		1 Tahun	Rp 22.985.000
5	02	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap APBD	Badan Pendapatan Daerah	7,5%	Rp 2.847.985.800	APBD		7,5%	Rp 4.102.606.900
5	02	01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Badan Pendapatan Daerah	9%	Rp 2.847.985.800	APBD		9%	Rp 4.102.606.900
5	02	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Rp 205.555.000	APBD		1 Dokumen	Rp 248.489.000
5	02	01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Rp 156.615.000	APBD		1 Dokumen	Rp 268.150.000
5	02	01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	10 Kecamatan	Rp 174.867.700	APBD		10 Kecamatan	Rp 374.356.900
5	02	01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Rp 165.224.500	APBD		1 Dokumen	Rp 262.549.200
5	02	01	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Rp 223.589.800	APBD		1 Dokumen	Rp 354.242.000
5	02	01	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Badan Pendapatan Daerah	86222 WP PB 1302 WPBPHTB	Rp 348.523.800	APBD		86222 WP PB 1302 WPBPHTB	Rp 681.890.800
5	02	01	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	1571 WP	Rp 252.585.200	APBD		1571 WP	Rp 267.520.200
5	02	01	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Rp 376.149.000	APBD		1 Dokumen	Rp 244.300.000
5	02	01	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Rp 196.804.600	APBD		1 Dokumen	Rp 355.092.000
5	02	01	Penagihan Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	Rp 1.100.000.000,00	Rp 318.899.600	APBD		Rp 1.100.000.000,00	Rp 593.339.600
5	02	01	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	49 Kasus	Rp 209.637.600	APBD		49 Kasus	Rp 202.677.200
5	02	01	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Rp 219.534.000	APBD		1 Dokumen	Rp 250.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Paser untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Bapenda Kabupaten Paser Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 sesuai Pagu indikatif yang tercantum pada aplikasi SIPD, yaitu sebesar Rp. 14.992.673.044,- pada tahun 2023 dan Rp. 17.659.632.436,- untuk tahun 2024.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten

Paser Tahun 2024,

maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan Daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Badan Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Paser 2021 - 2026. Visi Badan Pendapatan Daerah dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser adalah "Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dengan Pelayanan yang Prima"

BAB V

PENUTUP

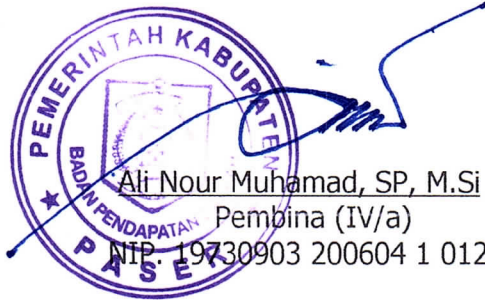
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 mengacu kepada Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 – 2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah. Semoga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat

tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Paser tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tana Paser, April 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Paser



Ali Nour Muhamad, SP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19730903 200604 1 012